

Desa Pematang Lima Suku Miliki Peta Administrasi Tapal Batas Dari Citra Satelit

Randy Pratama - BATANGHARI.INDONESIASATU.CO.ID

Jul 28, 2021 - 22:10



Pemerintah Desa Pematang V Suku

Batanghari, Jambi - Desa Pematang Lima Suku Kecamatan Muara Tembesi kini memiliki peta administrasi tapal batas dari foto satelit, Peta dengan kelebihan lebih rinci dibanding dengan peta yang sudah ada, Rabu (28/07/2021).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Pematang Lima Suku Mashuri, S.E.,

kepada Jurnalis Indonesia Satu di ruang kerjanya.

Mashuri memaparkan selama ini belum ada peta administrasi dari desa, dan dirinya bekerja sama dengan putera daerah yang kuliah dari Universitas Bung Hatta untuk membuat peta administrasi Desa Pematang Lima Suku.

“Keuntungannya nanti apabila desanya memiliki PAD (pendapatan asli daerah) maka dia sudah tahu berapa kawasan besar PAD yang didapat dari desanya, termasuk nanti ada koordinat batubara, tambang nikel, ataupun ada emas, itu bisa dipetakan dari peta administrasi tersebut,” pungkasnya.

Ditambahkannya, peta tersebut sudah disahkan oleh BPN pada saat pemekaran dan bersama BPN membuat titik kordinat yang berbatasan dengan desa lain.

“Dari koordinat yang sudah ditentukan BPN inilah kami sinkronisasikan dengan foto citra satelit. Foto satelit ini bisa menentukan lebih rinci lagi dari nama-nama dusun bisa kita dapatkan, tapi BPN hanya mengukur koordinat perbatasan dengan desa tetangga,” tutur Mashuri.

Menurutnya, dengan adanya peta administrasi maka bisa meminimalisir terjadinya sengketa lahan dari desa tetangga, dan bisa mengetahui luas lahan kosong yang dimiliki desa.

“Dengan adanya program RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang ingin dibangun pemerintah kabupaten Batanghari, tentu ini ada kesempatan untuk merubah perda RT/RW, didalam perda RT/RW ini lah bisa menyesuaikan tata ruang untuk seluruh desa, kecamatan se-kabupaten Batanghari.”

Ditambahkannya, “Bupati sudah mulai aktif untuk melobi tapal batas kabupaten dengan bupati lain seperti Tanjabbar dan Tebo dan Muaro Jambi, mudah-mudahan ini ada modal untuk teman-teman kita di DPRD untuk merubah daripada tata ruang di Kabupaten Batanghari, sehingga desa-desa bisa memiliki peta administrasi sendiri untuk desanya masing-masing,” harapnya.

“Jika ada desa-desa lain untuk studi banding ke kami akan tunjuk kepada desa-desa yang ingin membuat tapal batas ini,” tutup Mashuri.

(Randy)